

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam sumber penerimaan negara, salah satunya berupa APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara). Atas kontribusi yang diberikan, maka tidak terlepas bahwa pajak memiliki peran penting terhadap pembangunan dan pembiayaan negara. Pembangunan diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang hasilnya ditunjukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pohan, 2013:1). Dana untuk pembangunan negara dapat diperoleh dari pemerintah, swasta, maupun dana yang dihimpun dari masyarakat berupa pajak.

Peran masyarakat dalam partisipasi terhadap pembangunan negara diharapkan dapat teralokasikan secara optimal. Hal ini dapat terealisasi apabila masyarakat sadar, berperan aktif, dan patuh dalam pembayaran pajak. Menurut Meiliawati dan Waluyo (2013:1) menyatakan bahwa peran pajak akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena tujuan utama dari penerimaan pajak adalah untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara, serta untuk mewujudkan terciptanya surplus anggaran dan penggunaannya untuk melunasi hutang negara sebelumnya.

Penerimaan negara harus ditingkatkan secara optimal dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan dapat meningkatkan

tingkat kesejahteraan masyarakatnya, sehingga ekonomi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan demikian, peran dari pajak dapat memberikan sumbangan yang besar bagi negara. Berikut disajikan tabel sumber penerimaan negara yang berasal dari APBN pada tahun 2007 sampai dengan 18 Oktober 2016 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-18 Oktober 2016

| Tahun | Penerimaan Dalam Negeri | Penerimaan Perpajakan | Persentase (%) |
|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 2007 | 706.108 | 490.988 | 69,53 |
| 2008 | 979.305 | 658.701 | 67,26 |
| 2009 | 847.096 | 619.922 | 73,18 |
| 2010 | 992.249 | 723.307 | 72,90 |
| 2011 | 1.205.346 | 873.874 | 72,50 |
| 2012 | 1.332.323 | 980.518 | 73,59 |
| 2013 | 1.432.059 | 1.077.307 | 75,23 |
| 2014 | 1.545.456 | 1.146.866 | 74,21 |
| 2015 | 1.758.331 | 1.489.256 | 84,70 |
| 2016 <u>Update:</u> 18Oktober 2016 | 1.846.076 | 1.565.784 | 84,82 |

Sumber: www.bps.go.id

Penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak dalam APBN pada tahun 2007 mencapai Rp490.988 miliar (69.53%), sedangkan sampai dengan 18 Oktober 2016 jumlah tersebut telah mencapai Rp1.565.784 miliar (84,82%). Tingkat penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan setiap

tahunnya maka pajak selalu menjadi fokus pemerintah dan menjadi tumpuan terbesar dalam APBN.

Selain besarnya sumber penerimaan pajak yang diterima dari APBN, penerimaan pajak yang diperoleh dari perusahaan juga cukup signifikan sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah atas penerimaan ini. Penerimaan pajak yang diperoleh dari perusahaan dapat dilihat dari laba perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur tentang informasi posisi keuangan, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi (Ilyas dan Priantara, 2015:7).

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan merupakan kewajiban untuk tetap dibayarkan sebesar laba yang diperoleh. Semakin besar laba perusahaan maka semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan. Bagi perusahaan yang ada di Indonesia, pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara sehingga dapat dikatakan bahwa pembayaran pajak penghasilan merupakan biaya bagi perusahaan (Sari dan Martani, 2010:1).

Manajemen perusahaan bertujuan untuk menyusun laporan keuangan dan memberikan informasi yang memadai mengenai profil, ekonomi, dan keuangan perusahaan. Laporan keuangan memberikan informasi yang berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Bagi pihak internal, laporan keuangan

diharapkan dapat mengambil keputusan bisnis. Disisi lain, laporan keuangan juga berguna bagi pihak eksternal seperti investor, kreditur, karyawan, masyarakat, pemasok, dan pemerintah. Semua informasi yang diberikan bermanfaat bagi para pemakainya tetapi informasi yang diberikan lebih ditekankan pada informasi laba.

Informasi laba menjadi bagian dari laporan keuangan yang dianggap paling penting karena informasi tersebut secara umum dipandang sebagai representasi kinerja manajemen pada periode tertentu. Menurut Belkaoui dalam Handayani dan Rachadi (2009:36) menjabarkan pentingnya informasi laba bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: Pertama karena laba dijadikan dasar bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen. Kedua, laba merupakan dasar dalam memperhitungkan kewajiban perpajakan perusahaan. Ketiga, laba dipandang sebagai petunjuk dalam menentukan arah investasi dan pembuatan keputusan ekonomi. Keempat, laba diyakini sebagai sarana prediksi yang membantu dalam memprediksi laba dan kejadian ekonomi di masa mendatang. Kelima, laba dijadikan pedoman dalam mengukur kinerja manajemen.

Informasi yang diberikan oleh manajer perusahaan (*agent*) kepada pemilik (*principle*) terdapat konflik kepentingan dan ada perbedaan motivasi diantara keduanya sehingga menyebabkan munculnya asimetri informasi. Hal ini disebabkan karena pihak internal mengharapkan pembayaran pajak lebih kecil sehingga konsekuensinya adalah laba pada laporan keuangan menjadi kecil. Berbeda dengan informasi yang diberikan kepada pihak eksternal dalam hal ini adalah investor, mereka mengharapkan laba perusahaan tinggi pada laporan keuangan karena laba yang tinggi menunjukkan performa perusahaan yang bagus.

Konsekuensinya adalah dengan laba yang tinggi maka pajak yang harus dibayarkan juga besar. Oleh karena itu, diharapkan adanya penyajian laporan keuangan yang transparan, reliabel, akuntabel, dan memadai pada perusahaan yang akan diinvestasikan. Dengan demikian, penting bagi perusahaan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat menarik investor berinvestasi.

Penyajian laba pada laporan keuangan dapat menjadi tolak ukur seorang manajer di perusahaan apakah manajer telah memberikan kontribusi yang optimal. Hal ini dapat dinilai dengan pencapaian kinerja manajer di perusahaan, karena kinerja manajer dikaitkan pada motivasi dalam menyampaikan laba. Manajer perusahaan harus memberikan informasi laba kepada pihak yang membutuhkan seperti pihak internal maupun eksternal. Informasi ini haruslah menggambarkan keadaan ekonomi dan keuangan perusahaan yang sebenarnya, tetapi pada kenyataannya banyak pihak manajer memanipulasi laporan keuangan seperti menaikkan laba untuk menarik pihak eksternal seperti investor untuk berinvestasi. Tindakan-tindakan ini mengindikasikan bahwa manajer melakukan praktik manajemen laba (*earning management*).

Manajemen laba adalah kemampuan untuk “memanipulasi” pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan (Belkaoui, 2011:74). Oleh karena itu, keinginan perusahaan untuk mencapai laba merupakan salah satu insentif yang dapat menyebabkan manajer melakukan manajemen laba. Terdapat 3 cara manajer melakukan manajemen laba antara lain memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi

akuntansi, mengubah metode akuntansi, dan mengeser periode biaya atau pendapatan (Sayekti., dkk. 2011:8).

Menurut Timuriana dan Muhamad (2015:13) tindakan manajemen laba didasarkan pada berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya. Artinya tindakan manajemen laba dilakukan mengandung motivasi-motivasi tertentu karena tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh sering dikaitkan dengan prestasi manajemen, memang sesuatu yang lazim besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajemen tergantung dari besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan. Selain motivasi bonus, motivasi penghematan pajak menjadi motivasi yang paling nyata.

Penghematan pajak (*tax saving*) adalah usaha memperkecil jumlah pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan (Pohan, 2013:24). Penghematan pajak (*tax saving*) merupakan salah satu bagian dari perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah meminimumkan kewajiban pajak, hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Penelitian mengenai perencanaan pajak diukur dengan tarif retensi pajak (*tax retention rate*) yang menganalisis suatu ukuran dan efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild *et al*, 2004).

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2013:6) menyatakan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif dimana semakin tinggi perencanaan pajak maka

semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan sehingga masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba.

Menurut PSAK No. 46 laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual bukan pada basis kas. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian yaitu bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga liabilitas pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik.

Basis akrual disepakati sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan karena lebih rasional dan wajar dibandingkan dengan basis kas. Adanya fleksibilitas dalam PSAK memungkinkan pertimbangan manajemen dalam akuntansi akrual. Dalam PSAK No. 46 juga menyatakan bahwa nilai pencatatan aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali (pada tanggal neraca). Dengan adanya kewajiban untuk selalu melakukan peninjauan kembali pada tanggal neraca, maka setiap tahun manajemen harus membuat suatu penilaian untuk menentukan saldo aktiva pajak tangguhan dan cadangan aktiva pajak tangguhan, sedangkan penilaian manajemen untuk menentukan saldo cadangan aktiva pajak

tanggungan tersebut berdasarkan estimasi dan pengalaman sehingga bersifat subjektif. Mengacu pada pernyataan tersebut maka akuntan manajemen dan profesi akuntan harus dapat meningkatkan kemampuan pertimbangannya (*judgement*) dalam menentukan penghasilan masa lalu dan masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada penilaian aktiva pajak tanggungan yang dapat dimungkinkan dapat digunakan sebagai indikator adanya manajemen laba.

Pengakuan aset atau liabilitas pajak tanggungan didasarkan pada fakta bahwa adanya kemungkinan pemulihan aset atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau besar. Apabila akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar di masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan harus diakui sebagai suatu kewajiban. Apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan harus diakui sebagai suatu aset (Timuriana dan Muhamad, 2015:15).

Aset pajak tanggungan (*deferred tax asset*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian (PSAK No. 46). Pada rekonsiliasi fiskal, aset pajak tanggungan terjadi apabila koreksi positif di mana pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada komersial dan beban menurut fiskal lebih kecil daripada komersial. Akibatnya perusahaan akan membayar pajak lebih kecil di periode mendatang. Penelitian yang dilakukan oleh Timuriana dan Muhamad (2015:18) menunjukkan bahwa aset pajak tanggungan berpengaruh terhadap manajemen laba. Aset pajak tanggungan yang

jumlahnya diperbesar oleh manajemen dimotivasi untuk minimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Pajak yang seharusnya dibayarkan pada periode sekarang dialihkan pada periode mendatang dengan demikian laba perusahaan pun akan meningkat karena beban pajak yang harus dibayarkan lebih kecil.

Penyajian laba kena pajak yang dilaporkan perusahaan tidak akan sama antara laba yang disajikan oleh akuntansi dan pajak. Hal ini dikarenakan, dasar laporan keuangan akuntansi adalah SAK (Standar Akuntansi Keuangan) sedangkan dasar dari laporan keuangan perpajakan adalah Undang-Undang Perpajakan. Akibat adanya 2 penyajian laporan keuangan dalam perusahaan maka terdapat perbedaan laba. Perbedaan laba disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban di mana ada pendapatan atau beban yang boleh diakui/dikurangkan di akuntansi tapi tidak boleh diakui/dikurangkan di pajak dan begitu juga sebaliknya. Perbedaan pengakuan ini disebabkan oleh beda permanen dan beda waktu. Oleh karena itu, perusahaan wajib untuk melakukan rekonsiliasi fiskal yang menyebabkan munculnya koreksi positif atau koreksi negatif. Koreksi positif pada rekonsiliasi fiskal disebabkan karena perbedaan waktu yang menyebabkan munculnya aset pajak tangguhan, akun ini muncul apabila laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal.

Beda tetap yaitu perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan. Dari perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Beda tetap

tidak mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan, sedangkan beda sementara sebenarnya secara keseluruhan pendapatan atau beban antara akuntansi dan pajak sama, hanya berbeda alokasinya setiap tahun. Perbedaan ini berasal dari adanya perbedaan akrual dan realisasinya, penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiskal antara akuntansi dan perpajakan. Dari beda waktu tersebut muncul aset atau kewajiban pajak tangguhan

Manajemen laba dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, selain disebabkan oleh perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan salah satu yang dapat mempengaruhinya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah tingkat identifikasi kecil atau besarnya suatu perusahaan. Menurut Hilmi dan Ali (2008) dalam Prasetya dan Gayatri (2016:515) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja, kapitalisasi pasar, total penjualan, total nilai aktiva, dan sebagainya. Semakin besar kapitalisasi pasar menandakan semakin perusahaan diketahui oleh masyarakat, semakin besar penjualan menandakan perputaran uang semakin banyak, dan semakin besar aktiva menandakan modal yang ditanam semakin banyak. Total aset digunakan sebagai pengukuran variabel ukuran perusahaan pada penelitian ini.

Bedasarkan penjabaran di atas dan penelitian terdahulu saya tertarik untuk meneliti pengaruh aset pajak tangguhan, ukuran perusahaan, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Penelitian ini penting bagi calon investor ataupun orang awam agar dapat memahami mengenai tindakan ataupun

motivasi suatu perusahaan melakukan indikasi manajemen laba sehingga akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pajak yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang dibahas untuk membatasi ruang lingkup penelitian yaitu:

1. Apakah aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah terurai di atas dapat diketahui bahwa maksud penelitian untuk mendapatkan data maupun informasi yang relevan dengan masalah yang diidentifikasi, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh perencanaan pajak berpengaruh manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan bahwa hasilnya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak dibawah ini:

1. Bagi Investor

Dengan informasi yang ada, investor tidak salah dalam memilih perusahaan yang akan diinvestasikan dan lebih berhati-hati pada laporan keuangan yang disajikan sehingga informasi yang diberikan tidak menyesatkan.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Dapat meningkatkan dan menyempurnakan kebijakan perpajakan sehingga tidak ada celah yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara.

3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan pemahaman mengenai aset pajak tangguhan, ukuran perusahaan, dan perencanaan pajak serta hal-hal yang dapat memotivasi manajer dalam melakukan indikasi manajemen laba di perusahaan.